JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
Vol. 10 No.1 , Juni 2026, Hal 78 – 89. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM AS A PUBLIC POLICY INSTRUMENT FOR POVERTY REDUCTION

Rahmita Febi Nuraini[*], Nadila Rizki Auliya, Indah Prabawati, Wilda Sumarsyah
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
*E-mail koresponden : 25040674044@mhs.unesa.ac.id

disubmit: 3 Mei 2026, direvisi: 29 Juni 2026, diterima: 29 Juni 2026

ABSTRAK

Kemiskinan sebagai masalah multidimensi menjadi tantangan pokok dalam pembangunan, sehingga memerlukan kebijakan yang melampaui bantuan sementara dan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial berbasis bantuan bersyarat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan PKH sebagai alat kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan *kualitatif deskriptif* melalui pemeriksaan berbagai artikel ilmiah terkait. Temuan menunjukkan bahwa PKH berkontribusi penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, serta berfungsi sebagai jaring pengaman sosial saat krisis. Meskipun begitu, efektivitas implementasinya masih terkendala oleh elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kendala utama yang terungkap adalah ketidaktepatan penargetan penerima manfaat, keterbatasan kemampuan pendamping, serta koordinasi antarinstansi yang lemah. Oleh karenanya, PKH termasuk kebijakan efektif untuk jangka pendek, tetapi membutuhkan perbaikan tata kelola dan penggabungan dengan program pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyumbang pada pengayaan studi implementasi kebijakan publik melalui sintesis temuan literatur.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Kebijakan Publik, Kemiskinan, Implementasi Kebijakan, Systematic Literature Review (SLR)

ABSTRACT

Poverty as a multidimensional problem, is a fundamental challenge to development, necessitating policies that go beyond temporary assistance and strengthen the quality of human resources. The Indonesian government has implemented the Family Hope Program (PKH) as a form of conditional social protection. This study aims to analyze the implementation of PKH as a public policy tool to reduce poverty and identify factors influencing its effectiveness. The study employed a Systematic Literature Review (SLR) method with a descriptive qualitative approach through an examination of various related scientific articles. The findings indicate that PKH contributes significantly to improving

Nuraini, R. F., N. R. Auliya, I. Prabawati, & W. Sumarsyah (2026). JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 10(01), page 78 – 89 https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423
© The Author(s)
Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Vol. 10 No.1 , Juni 2026, Hal 78 – 89. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423

the welfare of the poor, particularly in education and health, and serves as a social safety net during crises. However, its effective implementation remains hampered by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The main obstacles identified are inaccurate targeting of beneficiaries, limited capacity of facilitators, and weak inter-agency coordination. Therefore, PKH is an effective short-term policy, but requires improved governance and integration with economic empowerment programs to achieve sustainable poverty alleviation. This research contributes to the enrichment of public policy implementation studies through a synthesis of literature findings.

***Keywords**: Family Hope Program, Public Policy, Poverty, Policy Implementation, Systematic Literature Review (SLR)*

PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi persoalan sosial yang cukup sulit untuk diselesaikan karena memiliki cakupan permasalahan yang luas dan saling berkaitan. Kondisi kemiskinan tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga terlihat dari terbatasnya akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, serta jaminan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, kemiskinan dipandang sebagai masalah multidimensional yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam skala internasional, isu pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai salah satu fokus utama pembangunan global melalui agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada tujuan pertama, yaitu *No Poverty*. Agenda tersebut menekankan pentingnya penyediaan perlindungan sosial yang lebih kuat, pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta pengurangan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, pemerintah telah menjalankan berbagai program dan kebijakan sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin masih menunjukkan angka yang relatif besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 1, tingkat kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,57% atau setara dengan lebih dari 24 juta penduduk (BPS, 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional. Keadaan ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat hanya bergantung pada bantuan ekonomi yang bersifat sementara, melainkan juga memerlukan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar masyarakat dapat keluar dari kondisi

Vol. 10 No.1 , Juni 2026, Hal 78 – 89. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423

rentan dan mencapai taraf hidup yang lebih baik (Rahmawati, 2022; Sofianto, 2020).

Tabel 1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia (2022-2025)

Tahun	*Jumlah (Juta Jiwa)*	*Persentase (%)*
2022	26,16	9,57
2023	24,79	9,36
2024	24,06	8,57
2025	23,85	8,47

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan SDGs, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu alat kebijakan perlindungan sosial yang berbasis *conditional cash transfer*.

Program tersebut dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin melalui bantuan sosial bersyarat yang terintegrasi dengan perluasan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, serta aspek kesejahteraan sosial lainnya. Beberapa studi mengungkapkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam memperkuat partisipasi pendidikan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan (Ningsih & Sholihah, 2025).

Meskipun begitu, pelaksanaan PKH masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya. Masalah utama yang kerap timbul mencakup ketidaktepatan penargetan penerima manfaat, keterbatasan tenaga pelaksana, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Studi oleh Maulia et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas PKH sangat bergantung pada akurasi data penerima dan kemampuan pendamping. Di samping itu, komunikasi kebijakan yang kurang memadai serta kerumitan struktur birokrasi juga menjadi hambatan dalam implementasi program di lapangan.

Dalam kajian implementasi kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dirancang, tetapi juga pada bagaimana kebijakan itu dijalankan di lapangan. George C. Edward III menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Fajri et al., 2022). Keempat unsur tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain sehingga dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama dalam mendukung upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang pengentasan kemiskinan.

Vol. 10 No.1 , Juni 2026, Hal 78 – 89. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423

Berbagai kajian sebelumnya telah membahas implementasi PKH, tetapi mayoritas bersifat parsial dan terfokus pada aspek atau wilayah tertentu. Misalnya, penelitian Putri (2022), lebih menekankan dampak PKH pada bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan Zaini dan Nurjaman (2022) memusatkan perhatian pada pelaksanaannya selama pandemi. Dengan demikian, masih ada celah penelitian, yaitu belum adanya analisis komprehensif yang mengintegrasikan temuan empiris mengenai implementasi PKH melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis teori Edward III.

Merujuk pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen kebijakan publik dalam rangka mengatasi kemiskinan dan mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan Pertama (*No Poverty*). Selain itu, analisis ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu efektivitas pelaksanaan PKH serta menyusun sintesis temuan sebagai kontribusi untuk pengembangan studi implementasi kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

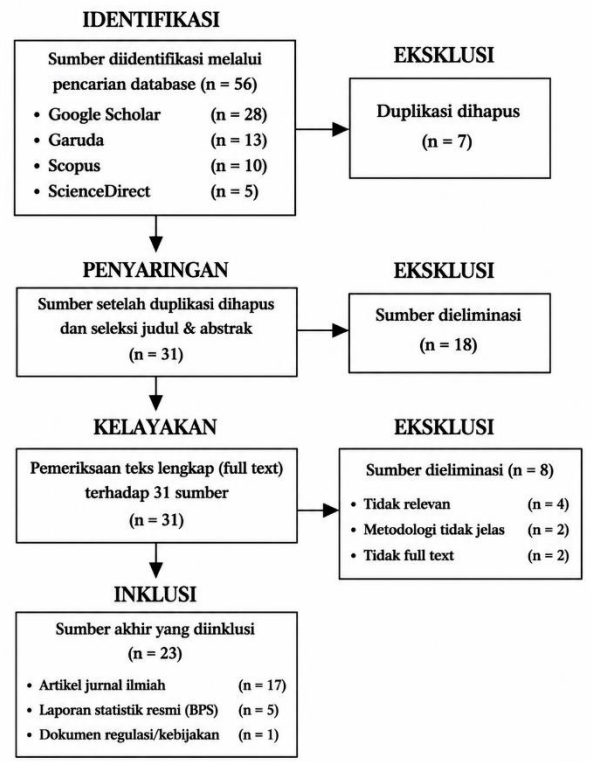
Studi ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dikombinasikan dengan metode kualitatif deskriptif guna menelaah penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) selaku salah satu bentuk intervensi kebijakan publik dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Penerapan SLR dimaksudkan untuk menghimpun dan menyintesiskan berbagai hasil penelitian empiris secara sistematis dan terencana, sehingga mampu mengidentifikasi kesenjangan antara target kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Proses *review* dilaksanakan berdasarkan panduan PRISMA *(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)* guna memastikan setiap tahapan tinjauan berjalan secara terbuka, terorganisasi, dan dapat direplikasi.

Vol. 10 No.1 , Juni 2026, Hal 78 – 89. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423

Data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, laporan statistik resmi, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan PKH dan penanggulangan kemiskinan. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui empat platform akademik, yaitu Google Scholar, Garuda, Scopus, dan ScienceDirect, dengan menggunakan kata kunci utama: "Program Keluarga Harapan", "implementasi kebijakan publik", "kemiskinan", "efektivitas kebijakan sosial", dan "*conditional cash transfer*". Pencarian dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2019–2026 untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran data.

Strategi Pencarian dan Seleksi Artikel

Tahapan pemilihan literatur dilakukan secara sistematis mengikuti empat proses utama sesuai alur PRISMA. Pertama, tahap identifikasi (*identification*): pencarian awal menghasilkan 56 sumber dari seluruh basis data (Google Scholar = 28, Garuda = 13, Scopus = 10, ScienceDirect = 5). Kedua, tahap penyaringan (*screening*): penghapusan duplikasi (n = 7) dan penilaian judul serta abstrak, sehingga tersisa 31 sumber yang relevan. Ketiga, tahap kelayakan (*eligibility*): pemeriksaan teks lengkap terhadap 31 sumber, dengan 8 sumber



Gambar 1. Diagram Seleksi Literatur Sesuai dengan Alur Prisma

dieksklusi karena tidak memenuhi kriteria inklusi. Keempat, tahap inklusi (*inclusion*): menghasilkan 23 sumber final yang digunakan dalam analisis, terdiri atas 17 artikel jurnal ilmiah, 5 laporan statistik resmi BPS, dan 1 dokumen regulasi kebijakan (Lihat gambar 1).

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: (1) sumber membahas secara langsung pelaksanaan, dampak, atau efektivitas PKH; (2) diterbitkan dalam jurnal ilmiah terindeks, laporan statistik resmi, atau dokumen kebijakan pemerintah; (3) menggunakan metodologi yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan; serta (4) tersedia dalam versi teks lengkap (*full text*). Sebaliknya, sumber dieksklusi apabila: (1) tidak relevan dengan fokus kajian PKH atau kemiskinan di Indonesia; (2) merupakan duplikasi dari sumber yang sama; (3) tidak mencantumkan metodologi yang memadai; atau (4) diterbitkan sebelum tahun 2019.

Penilaian Kualitas Artikel

Penilaian kualitas artikel dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek: (1) relevansi topik dengan fokus kajian PKH dan implementasi kebijakan; (2) kejelasan metodologi yang digunakan; (3) reputasi jurnal atau lembaga penerbit; serta (4) kemutakhiran publikasi (2019–2026). Artikel yang memenuhi keempat aspek tersebut diprioritaskan dalam proses sintesis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan mengklasifikasikan temuan ke dalam tiga tema utama, yaitu: (1) pelaksanaan PKH di tingkat lapangan; (2) ketidaksesuaian antara sasaran dan capaian kebijakan; serta (3) faktor-faktor penentu efektivitas implementasi. Analisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edward III yang berfokus pada empat unsur utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Pada tahap akhir, sintesis literatur dilakukan untuk mengintegrasikan beragam temuan penelitian secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Implementasi PKH terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang memiliki peranan penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan mekanisme bantuan sosial bersyarat, PKH tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian, PKH diposisikan sebagai kebijakan transformatif yang dapat memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, program ini berhasil meningkatkan tingkat keikutsertaan anak dari keluarga penerima manfaat di sekolah. Kewajiban seperti kehadiran

Vol. 10 No.1 , Juni 2026, Hal 78 – 89. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423

sekolah berfungsi sebagai pendorong efektif bagi keluarga miskin untuk menjaga kelanjutan pendidikan anak, sehingga intervensi bantuan bersyarat ini memengaruhi pola alokasi sumber daya rumah tangga menjadi lebih produktif (Jehamat, 2021).

Pada sisi kesehatan, PKH juga menghasilkan pengaruh positif dalam memperbesar penggunaan layanan kesehatan primer. Penerima manfaat lebih proaktif melakukan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan anak, serta lebih taat mengikuti imunisasi dan program kesehatan lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mengubah pola perilaku kesehatan masyarakat.

Selain itu, di tengah krisis seperti pandemi COVID-19, PKH berperan sebagai jaring pengaman sosial yang strategis. Bantuan yang disalurkan membantu menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga miskin dengan memenuhi kebutuhan esensial saat pendapatan menurun. Temuan ini membuktikan fleksibilitas dan ketangguhan PKH dalam merespons perubahan dinamika sosial-ekonomi (Alwi & Sulni, 2022).

Walaupun demikian, manfaat positif PKH belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kemandirian ekonomi yang substansial. Sejumlah penelitian menemukan adanya kecenderungan ketergantungan pada bantuan sosial di kalangan penerima. Hal ini menandakan bahwa transformasi perilaku ekonomi memerlukan waktu lebih lama serta pendekatan kebijakan yang lebih holistik, meliputi tidak hanya bantuan sosial tetapi juga program pemberdayaan ekonomi (Ningsih & Sholihah, 2025).

Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi PKH dalam Perspektif Implementasi Kebijakan

Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak semata-mata bergantung pada rancangan kebijakan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di tingkat lapangan. Dalam pandangan implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang menentukan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

1. Komunikasi; Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada masyarakat dinilai masih belum optimal. Pelaksanaan sosialisasi program belum mampu

Vol. 10 No.1 , Juni 2026, Hal 78 – 89. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423

menjangkau seluruh kelompok sasaran secara menyeluruh, sehingga masih terdapat penerima manfaat yang belum memahami secara penuh tujuan maupun mekanisme pelaksanaan PKH. Hal ini berdampak pada kurang tepatnya pemanfaatan bantuan serta munculnya persepsi yang keliru terhadap program. Selain itu, komunikasi antar pelaksana kebijakan juga belum terintegrasi dengan baik, sehingga menghambat koordinasi dalam pelaksanaan program di lapangan (Maulia, 2024; Sofianto et al., 2020).

2. Sumber Daya; Ketersediaan sumber daya menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi PKH. Keterbatasan jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, kapasitas dan kompetensi pendamping yang belum merata juga memengaruhi kualitas implementasi program. Keterbatasan fasilitas dan sistem pendukung, terutama dalam hal pendataan, semakin memperkuat hambatan dalam pelaksanaan program (Zaini & Nurjaman, 2022).
3. Disposisi; Disposisi atau sikap pelaksana dan penerima manfaat menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Dari sisi pelaksana, terdapat komitmen dalam menjalankan program, namun masih terdapat variasi dalam tingkat profesionalisme. Sementara itu, dari sisi penerima manfaat, PKH berhasil mendorong perubahan perilaku positif dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Ketergantungan terhadap bantuan sosial masih menjadi tantangan dalam implementasi program (Jehamat, 2021; Ningsih & Sholihah, 2025)
4. Struktur Birokrasi; Struktur birokrasi menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi efektivitas implementasi PKH. Permasalahan utama terletak pada sistem pendataan yang belum akurat dan tidak diperbarui secara berkala, sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal serta kompleksitas prosedur administrasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola birokrasi, khususnya dalam integrasi data dan koordinasi lintas sektor, menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi

Vol. 10 No.1 , Juni 2026, Hal 78 – 89. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.423

PKH (Anggraeni & Nugroho, 2022; Sofianto, 2020).

Secara keseluruhan, implementasi PKH telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh berbagai faktor implementasi kebijakan, terutama pada aspek struktur birokrasi dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan, agar PKH dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR), Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti memberikan dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, PKH juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan-1 yaitu *No Poverty*. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi program ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor utama dalam kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kendala utama yang muncul mencakup ketidakakuratan data penerima manfaat, keterbatasan kemampuan pendamping program, serta koordinasi antarlembaga yang kurang memadai, yang mengakibatkan ketidaktepatan sasaran dan dampak yang belum berkelanjutan secara optimal. Dengan demikian, PKH dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang efektif untuk jangka pendek, tetapi memerlukan perbaikan tata kelola, peningkatan kapabilitas pelaksana, dan penggabungan dengan program pemberdayaan ekonomi agar mampu membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini menyumbang pada ranah akademik melalui sintesis pelaksanaan PKH yang berbasis teori Edward III, yang dapat menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan sosial di masa mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan sebagai berikut.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial sebaiknya meningkatkan mutu data penerima manfaat PKH dengan

mempererat integrasi dan pembaruan data secara rutin antarlembaga terkait, sehingga dapat mengurangi ketidaktepatan penargetan bantuan.

Kapasitas pendamping PKH perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkesinambungan, penambahan jumlah personel pendamping, serta penyeragaman standar kompetensi, agar pendampingan berlangsung lebih efektif dan merata di berbagai daerah.

Strategi komunikasi kebijakan harus diperbaiki dengan sosialisasi yang lebih terstruktur, inklusif, dan berorientasi komunitas, sehingga seluruh penerima manfaat dapat memahami informasi program secara lengkap.

Koordinasi antarinstansi pelaksana hendaknya diperkuat melalui mekanisme kerja yang lebih terpadu dan berbasis digital untuk memperlancar pelaksanaan program di lapangan.

Disarankan agar penelitian mendatang meneliti PKH dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed-method* untuk mengukur dampak jangka panjang program terhadap kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, M., & Sulni, M. (2022). Program Keluarga Harapan dan upaya pemenuhan kebutuhan keluarga di masa pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *11*(1), 1–15. https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2458

Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, *4*(2), 39–54.

Ayuh, E., Darmi, T., & Anwar, F. (2022). Communication analysis of assistance family property programs to improve the independence of beneficiary families. *Jurnal Niara*, *8*(1), 1–10.

Damayanti, D., Stiawati, T., & Arenawati, A. (2025). Program Keluarga Harapan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Literatur terhadap Kontribusinya terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *4*(3), 637–642. https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8698

Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial BPNT dan PKH terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, *11*(2), 196–202. https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654

Fajri, A. K., Larasati, D., & Alifkah, S. P. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, *7*, 158–170.

Julia, R. (2023). Struktur birokrasi dan implementasi program sosial di Indonesia. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *9*(1), 30–47.

Maulia, R. (2024). Akurasi data dan efektivitas pendamping PKH dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, *8*(2), 45–58.

Mirlana, D. E., Fatta, A. K., & Subagyo, A. (2024). Program Keluarga Harapan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *12*(1), 35–52.

Ningsih, S. R., & Sholihah, W. I. (2025). Dalam menavigasi kemandirian sosial ekonomi melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Empati*, *14*(1), 1–15. https://doi.org/10.15408/empati

Putri, D. A. (2022). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, *11*(2), 88–99.

Rahman, F. (2024). Conditional cash transfer dan partisipasi pendidikan anak usia sekolah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, *3*(2), 1–14.

Rahmawati, S. (2022). Kebijakan perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan di Indonesia: Tinjauan kritis. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *8*(1), 55–70.

Sandy, F., Rintaria, R., & Ningrum, P. K. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *2*(4), 10–30. https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1382

Badan Pusat Statistik (2023a). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html

Badan Pusat Statistik (2023b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html

Badan Pusat Statistik (2025a). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html

Badan Pusat Statistik (2025b). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html

Badan Pusat Statistik (2026). *Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html

Sunarto, S. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *3*(2), 97–112. https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.50

Tiwa, R., Posumah, J., & Londa, V. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam

Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, *4*(0), 339–350.

Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, *5*(2), 11–22.

Zaini, M., & Nurjaman, A. (2022). *The Implementation of the Family Hope Program (PKH) During the Pandemic in Batu City*. *10*(2), 159–169. https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7179